

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN: SALAH SATU PENUNJANG MENUJU KEMANDIRIAN POLRI

Oleh: DR. Singgih Riphart dan Ir. Syahrir Ika, MM

A. Mukadimah

Tanggal 1 April 1999, merupakan tanggal bersejarah bagi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk lepas dari ikatan manajerial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Hanya dalam sepuluh menit, pemisahan POLRI dari ABRI terjadi, suatu peristiwa yang diharapkan banyak kalangan untuk dapat mengantarkan POLRI menuju kemandiriannya. Menurut Jenderal Wiranto, pemisahan POLRI dari ABRI diarahkan untuk menempatkan kedudukan POLRI sebagai aparaturnya yang memenuhi kualifikasi standar, dan sebagai penegak hukum profesional yang sesuai tuntutan reformasi. Dalam keadaan tertib sipil, penyelenggaraan kamtibmas sepenuhnya dikendalikan POLRI demikian pula pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum.

Pemisahan POLRI dari ABRI juga memberi wewenang baru bagi POLRI untuk mendesain sendiri sistem pembinaan kemampuan dan kekuatan, serta pembinaan personil logistik dan anggaran POLRI. Di

sinilah makna kemandirian bagi POLRI dalam era kabinet reformasi pembangunan yang perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Salah satu instrumen pendukung yang perlu dipersiapkan secara terencana adalah instrumen pendidikan keprofesionalan khususnya program pasca sarjana magister manajemen (MM) yang dapat memberikan pengetahuan akademis kepada para aparat kepolisian dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi manajerial dalam setiap tugas pelayanannya kepada masyarakat secara mandiri dan profesional.

B. Paradigma Baru POLRI: Kemandirian dan Profesional

Persoalan yang perlu dicermati adalah dikumandangkannya paradigma baru POLRI, yaitu kemandirian dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian dan profesionalisme POLRI tidak bisa terwujud hanya melalui prosesi "pengulitan" dari tubuh ABRI, mengingat secara konseptual kemandirian dan keprofesionalan akan tercermin dari sikap dan

perilaku serta orientasi baru dalam paradigmanya yang melekat pada tubuh POLRI. Orientasi baru POLRI berarti ada kultur baru yang harus dimiliki aparat POLRI untuk keluar dari "kredo" militer, yang secara diskriminatif dapat membedakan budaya polisi dan tentara. Merubah paradigma POLRI tentu bukan merupakan pekerjaan mudah. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan kajian dan uji coba konsep serta proses sosialisasi dalam bentuk pendidikan, pelatihan dan pengembangan, termasuk bagaimana merubah pandangan baru masyarakat untuk memahami paradigma baru POLRI tersebut.

Dalam paradigma baru POLRI, ketika "kredo" militer dilepas, polisi harus tampil sebagai bagian dari masyarakat sipil yang tidak memagari secara kaku posisi berdirinya, dari depan, dari samping maupun, dari belakangnya, yang dapat merusak tatanan masyarakat dan mengganggu stabilitas penyelenggaraan pembangunan. Kekuatan riil yang harus dipakai bukan lagi kekuatan dalam determinasi tentara, akan tetapi kekuatan dalam determinasi paradigma baru POLRI, yaitu profesionalisme kepolisian yang banyak menggerakkan taktik-taktik yang persuasif, arif, bijaksana, dan edukatif dalam setiap sikap dan perjuangan mencegah kriminalitas masyarakat dan mem-

berikan pelayanan berupa perlindungan terhadap masyarakat.

Semua itu menuntut para aparat POLRI untuk memiliki ilmu pengetahuan yang sifatnya multi disiplin, yang sistematis dan berjenjang, sebagaimana yang selama ini diketahui oleh masyarakat sipil. Bidang-bidang ilmu, tak terkecuali, harus dipelajari secara mendalam oleh aparat kepolisian, mulai dari jenjang pendidikan strata satu hingga strata tiga (doktor). Salah satu bidang ilmu yang wajib dipahami secara baik oleh aparat POLRI adalah "management". Dalam melakukan fungsi-fungsi managerialnya, aparat kepolisian dituntut harus mendalami konsep-konsep manajemen modern, agar dapat memantau setiap gerak-gerik manajemen pada berbagai sektor usaha dan lembaga-lembaga pemerintah dan kemasyarakatan secara cermat dan terfokus pada aspek-aspek yang potensial menimbulkan kriminalitas. Pada posisi inilah, keberadaan pendidikan magister manajemen menjadi relawan untuk dimanfaatkan oleh aparat kepolisian dalam menjawab tuntutan dan tantangan masyarakat yang kian maju. Perubahan sikap dan perilaku anggota POLRI banyak ditentukan oleh pemahaman mereka terhadap konsep-konsep manajemen secara umum, serta berbagai disiplin ilmu yang memiliki hubungan langsung dengan konsep manajemen.

C. Misi dan Visi POLRI

Sebagai suatu organisasi yang berdimensi pelayanan publik, POLRI perlu menjelaskan kembali misi dan visinya. Misi POLRI menguraikan kerja organisasi dengan jelas, ringkas dan nyata, dan harus mencerminkan apa yang dilakukan oleh organisasi. Brellin at.al (1994) menyebutkan bahwa pernyataan misi (*mission statement*) suatu organisasi harus berorientasi kepada pelanggan, yang dalam hal ini bagi POLRI pelanggan berarti masyarakat umum. Penetapan misi suatu organisasi berarti meletakkan fondasi bagi segala aktivitas organisasi sekarang dan masa yang akan datang. Bagi POLRI, pernyataan misinya dapat ditetapkan sebagai berikut: "Meningkatkan pelayanan POLRI dalam rangka Kamtibmas sehingga sesuai dengan tuntutan yang dikehendaki masyarakat".

Selain misi di atas, POLRI juga dituntut mempunyai visi yang jelas, apalagi melihat tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin berat. Visi menurut definisi Brellin at.al (1994), melukiskan jenis organisasi yang ingin diwujudkan oleh organisasi yang bersangkutan atau bagaimana organisasi itu akan dilihat oleh pelanggan, karyawan dan masyarakat umum. Pernyataan visi bagi POLRI juga harus memberikan suatu dasar untuk mengenali jurang pemisah antara keadaan sekarang dan

keadaan di masa depan yang di-dambakan. Tuntutan masyarakat dan negara Republik Indonesia di masa depan adalah bagaimana memasuki arus globalisasi dan industrialisasi yang bersifat *borderless* ini dengan selamat.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan di sini adalah menjamin keselamatan bagi semua perusahaan global yang membuka usaha di Indonesia, baik yang bersifat penyertaan modal maupun bentuk-bentuk investasi langsung (*direct investment*) dan investasi portofolio di Indonesia. Dalam kondisi pasar yang makin transparan, tidak ada *barrier* di bidang tarif dan peraturan umum di bidang penanaman modal asing, arus uang, modal dan tenaga kerja akan keluar masuk secara bebas dan berkecepatan tinggi. Hanya ada dua implikasi yang bakal timbul dari pasar global ini, apakah merubah manfaat bagi negara ataukah sebaliknya merugikan negara. Pemanfaatan peluang ekonomi global ini tidak lagi hanya menjadi tugas para Menteri di bidang ekonomi, keuangan dan industri (EKUIN) dan para pengusaha, tetapi juga POLRI yang berperan strategis dalam mencegah timbulnya masalah kejahatan para profesional (*white collar crime*) yang secara nasional berkontribusi besar dalam menciptakan inefisiensi dan ekonomi biaya tinggi.

Dalam sistem perdagangan bebas dan global, pola kejahatan mengalami pergeseran dari masyarakat buruh yang berpendapatan rendah kepada para manajer yang terbius dengan peluang-peluang memperoleh kekayaan secara ilegal. Mereka yang tergolong dalam *white collar* ini menjadi ancaman bagi ketertiban dan kenyamanan usaha di dalam negeri. Kejahatan-kejahatan di bidang usaha perbankan, asuransi, pasar modal dan investasi pada umumnya akan semakin sering terjadi dengan skala yang cenderung semakin luas. Cara pemecahannya, tidak cukup dengan membuat regulasi-regulasi sebagai katup pengaman, melainkan harus juga disertai dengan tindakan pencegahan dan pembrantasan kejahatan yang dapat diperankan secara strategis oleh aparat kepolisian. Semua ini hanya dapat dilakukan POLRI kalau aparat POLRI juga memiliki bekal pengetahuan yang memadai tentang aspek-aspek teknis dan konsep di bidang keuangan dan manajemen pada umumnya. Pengetahuan dasar dan lanjutan seperti uang dan bank, asuransi, dana pensiun, reksa dana, dan pasar modal, serta konsep-konsep investasi secara umum menjadi mutlak harus dipelajari oleh aparat POLRI. Oleh karena itu, visi POLRI harus diarahkan pada upaya menciptakan iklim usaha yang aman, tertib dan berkelanjutan, sehingga membuat batas setiap warga negara dan unit usaha bekerja dalam rangka memperoleh hasil kerja yang dapat

mengoptimalkan manfaat sosial dan ekonomi. Hal ini hanya dapat diwujudkan dalam jangka panjang, jika mulai sekarang POLRI harus sudah berada pada posisi yang sebenarnya, yaitu memberikan pelayanan terbaik yang dapat memuaskan masyarakat umum.

D. Membangun kualitas Pelayanan POLRI

POLRI, sesuai dengan keberadaannya dalam dimensi ABRI, membawa empat peran strategis, yakni, (i) perlindungan masyarakat, (ii) penegakan hukum, (iii) pencegahan pelanggaran hukum, dan (iv) pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kualitas pelayanan POLRI kepada masyarakat lebih ditentukan oleh berperannya secara efektif keempat peran strategis di atas.

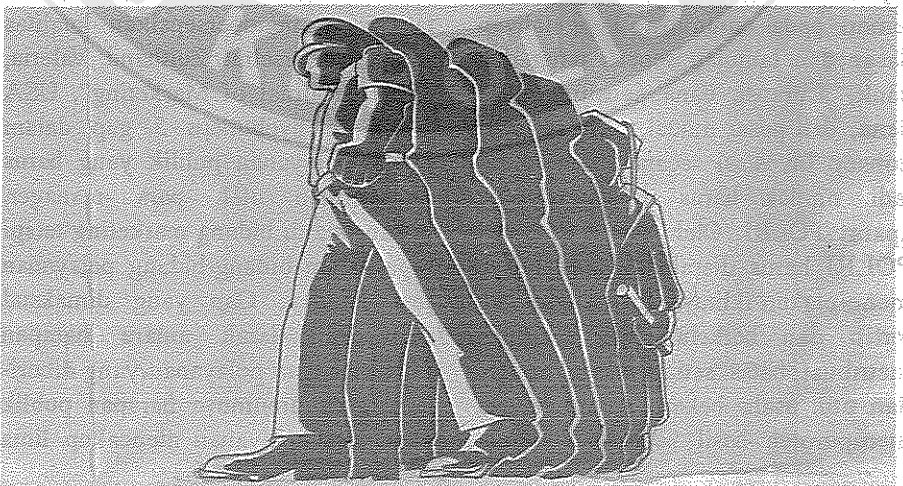
Untuk melaksanakan tugas-tugas POLRI dalam rangka mencapai kualitas pelayanan terbaik, aparat POLRI perlu mengenal faktor-faktor kualitatif yang mempersepsikan kualitas pelayanan tersebut. Zeithand, Valeria, dalam "Journal of Marketing", USA (1985) menyebutkan 5 gap dalam fungsi pelayanan publik yang harus diperhatikan oleh para manager, bukan saja di bidang marketing tetapi juga dalam bidang-bidang pelayanan jasa lainnya. Gap yang dimaksud merupakan jarak antara harapan publik dengan pelayanan yang diberikan. Pada umumnya harapan publik akan jasa pelayanan mencakup lima

elemen dasar, yakni (i) Reability, yang meliputi kesesuaian dan keakuratan pelayanan, (ii) responsiveness, yang meliputi kesigapan, tanggung jawab dan kecepatan aparat dalam pelayanan, (ii) assurance, meliputi pengetahuan, keramahan, perhatian, dan reputasi aparat pelayanan, (iv) emphyaty, yang meliputi kemudahan komunikasi, dan bersedia mendengar keluhan masyarakat, serta (v) tangibles, yang mencakup penampilan dan peralatan yang digunakan aparat.

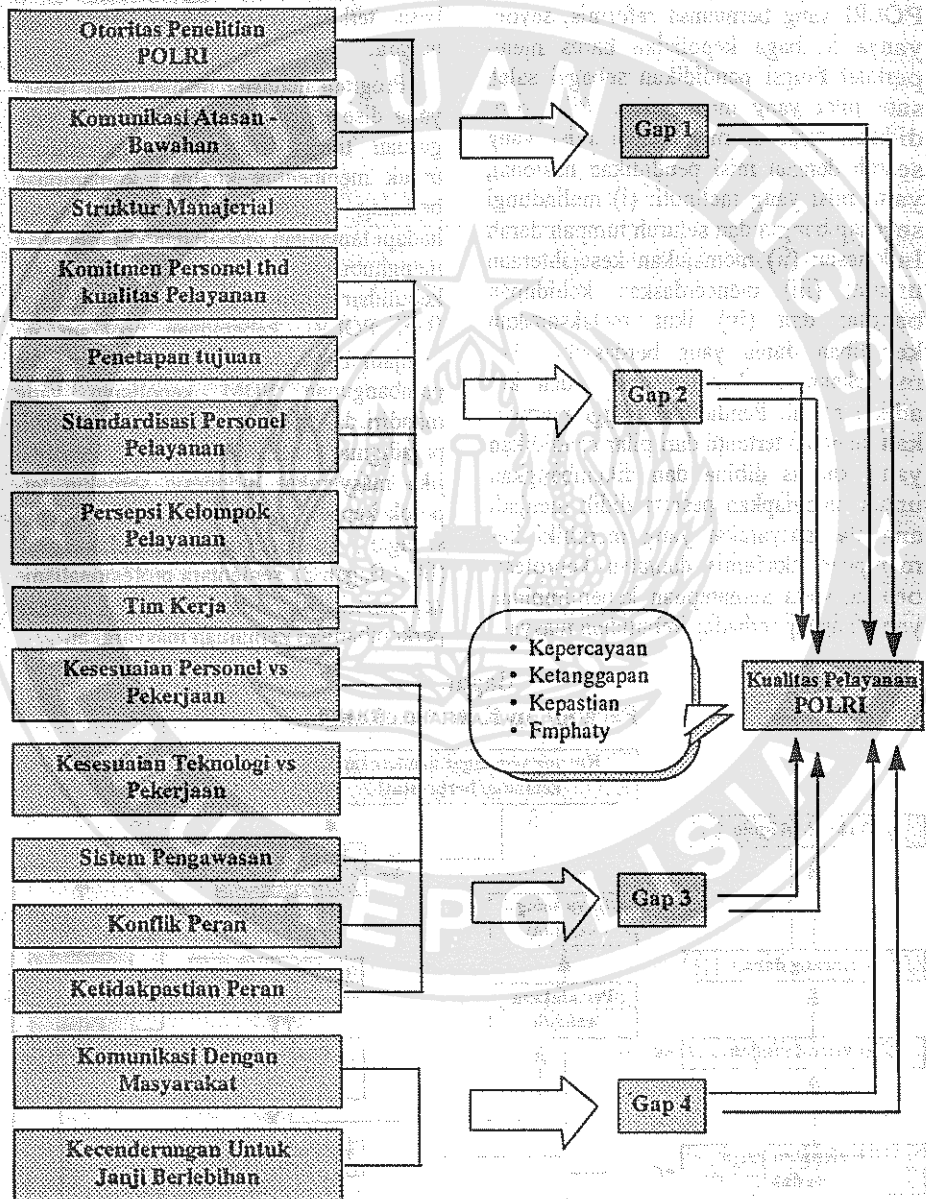
Dua peneliti BAKM (Singgih Riphath dan Evi Subardi) dalam suatu penelitian mereka (1997) menerjemahkan konsep kualitas pelayanan ala Zetihaml & Valeria ini ke dalam manajemen POLRI, (lihat Bagan I). Dengan menggunakan model ini, maka aparat kepolisian dituntut harus memiliki sejumlah pengetahuan akademis di beberapa bidang pelayanan strategis kepada publik seperti tercermin dalam 15 kotak pada Bagan I tersebut. Keprofesionalan dan kemandirian POLRI hanya bernilai jika

aparat POLRI mampu memperkecil 5 gap tersebut (dalam bagan I hanya disebut 4 dimensi pelayanan).

Program magister manajemen yang akan dipakai sebagai media akademis dalam rangka pengembangan konseptual aparat POLRI, seyogyanya harus memiliki ciri lebih spesifik, yaitu mengkombinasikan berbagai materi manajemen dan hukum ke dalam kurikulum utamanya agar dapat melakukan internalisasi kedua bidang ilmu tersebut dalam melaksanakan fungsi-fungsi POLRI yang disebutkan di atas. Selanjutnya, perlu pula diperdalam ilmu komunikasi bisnis terutama dalam mengembangkan perjanjian-perjanjian perdagangan, kemampuan penggunaan teknologi informasi, manajemen/pengelolaan perusahaan multinasional, dan *last but not least* pengetahuan untuk keluar dari krisis yang sedang melanda Indonesia saat ini atau manajemen krisis perusahaan dan hak azasi manusia.



Bagan I Kualitas Pelayanan POLRI



Sumber: Makalah Manajemen POLRI untuk Menghadapi Ancaman Kamtibmas 10 tahun Mendatang, oleh Singgih Riphart dan Evi Subardi.

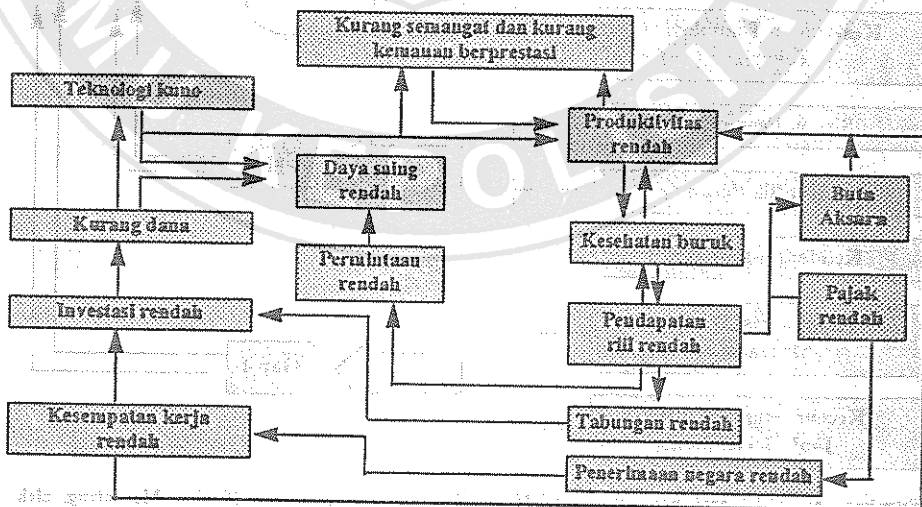
E. Tuntutan Program Magister Manajemen Bagi Aparat POLRI

Untuk membangun *corporate culture* POLRI yang bernuansa reformis, seyogyanya lembaga kepolisian harus memperkuat fungsi pendidikan sebagai salah satu pilar yang menentukan. Pilar pendidikan tersebut mempunyai misi yang searah dengan misi pendidikan nasional, yaitu misi yang meliputi: (i) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) memajukan kesejahteraan umum; (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan tertentu dari pilar pendidikan yang khusus dibina dan dikembangkan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan/atau keprofesionalan, serta kemampuan kepemimpinan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat

serta pengembangan pengetahuan dan teknologi, berjiwa penuh pengabdian dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

Program magister management (MM) yang diselenggarakan oleh beberapa perguruan tinggi Indonesia, dimaksudkan untuk membentuk kualitas, kemampuan bersaing peserta program dalam menghadapi tantangan global, dan kesanggupan menghubungkan pengetahuan dengan kebutuhan-kebutuhan masa mendatang. Bagi POLRI, keberadaan program ini menjadi bagian integral dalam kerangka pembangunan SDM kepolisian yang mandiri dan profesional. Adalah mustahil paradigma baru POLRI dapat terwujud jika masyarakat Indonesia semakin terpojok kepada suatu kondisi yang disebut sebagai "perangkap keterbelakangan" (lihat Bagan 2), sementara profesionalisme kepolisian harus memiliki sinergi dengan perkembangan kemajuan masyarakat.

Bagan 2
Perangkap Keterbelakangan

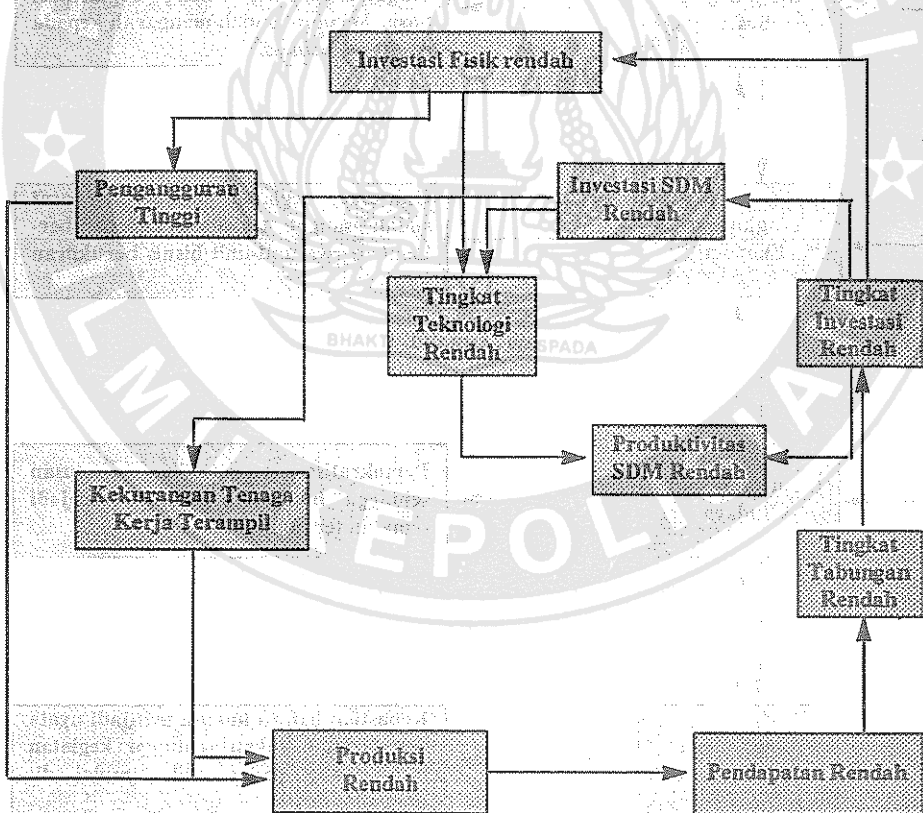


Sumber: Buku Reformasi Manajemen, karangan Bambang Tri Cahyono, disesuaikan dengan manajemen POLRI.

Di samping itu, bagaimana mungkin peran POLRI dapat mendorong perubahan besar masyarakat Indonesia menghadapi tuntutan globalisasi dalam berbagai dimensi kehidupan, jika sebagian besar masyarakat Indonesia masih terperangkap dalam tingkatan kemiskinan (lihat Bagan 3).

Pertanyaannya, apakah yang lebih utama bagi POLRI, mencegah kemiskinan atau membiarkan berkembangnya kemiskinan dengan risiko implikasi kriminalitasnya, lalu aparat kepolisian kemudian melakukan tindakan pembasmian.

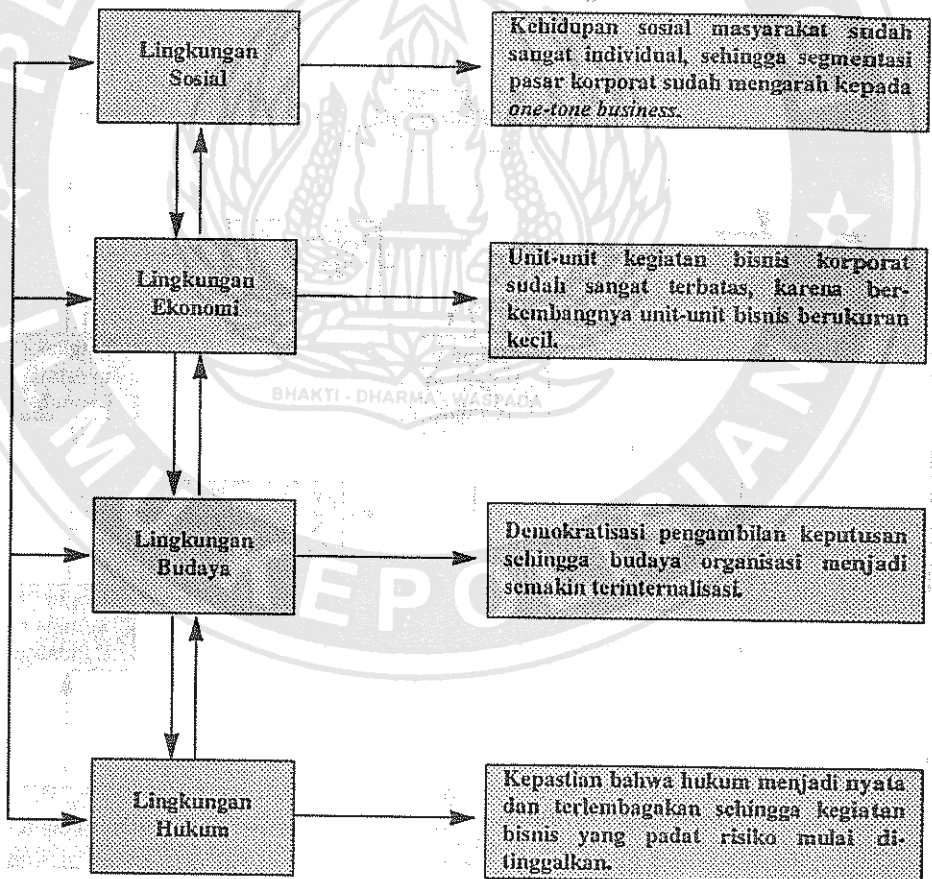
Bagan 3
Lingkaran Kemiskinan



Belum lagi tuntutan lingkungan abad 21 yang diwarnai oleh kecepatan arus informasi yang dapat menciptakan implikasi-implikasi sosial politik yang cukup signifikan (lihat Bagan 4). Bagan 4 menunjukkan bahwa ada interaksi aktif dari komponen-kom-

ponen lingkungan masyarakat yang harus dipahami secara baik oleh aparat kepolisian agar dapat mengambil tindakan-tindakan pencegahan terhadap lahirnya implikasi-implikasi negatif dari interaksi variabel-variabel lingkungan masyarakat tersebut.

Bagan 4
Aspek Lingkungan Strategis Korporat Abad 21

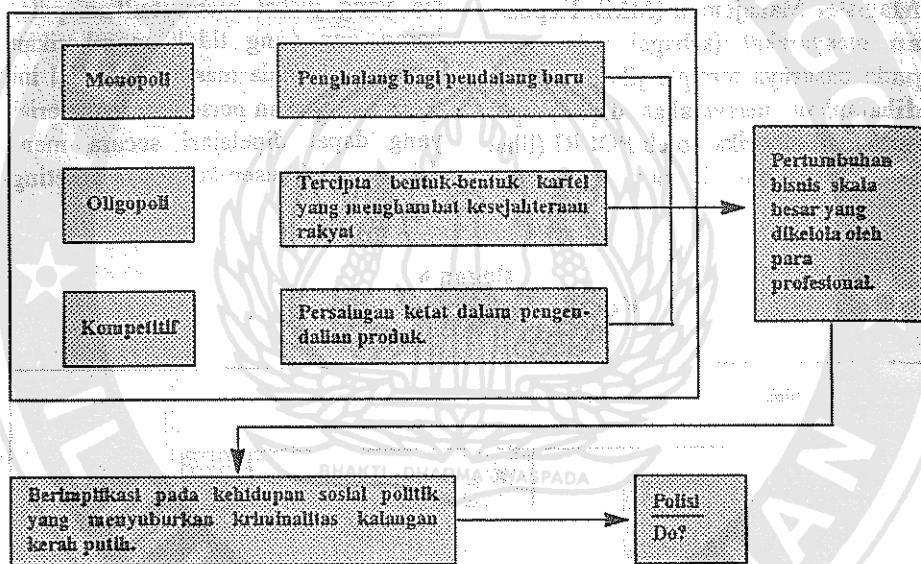


Sumber: Buku Reformasi Manajemen, karangan Bambang Tri Cahyono, disesuaikan dengan manajemen POLRI.

Struktur bisnis berkembang di Indonesia juga memiliki implikasi negatif yang harus dicermati secara baik oleh aparat Kepolisian untuk menyusun strategi pencegahan yang lebih cepat dan tepat (lihat Bagan 5).

menjadi nyata atau proses yang dapat meningkatkan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan masyarakat. Posisi POLRI yang tadinya tidak dapat bergerak leluasa dalam teritorial retorik militer, kini boleh melangkah

Bagan 5
Implikasi Struktur Bisnis



Sumber: Buku Reformasi Manajemen, karangan Bambang Tri Cahyono, disesuaikan dengan manajemen POLRI.

Dalam konteks paradigma barunya POLRI, era bebas dari ikatan ABRI harus bisa melahirkan citra baru (*new image*) kepolisian sebagai aparat negara yang memiliki "kreatifitas", dalam arti tumbuhnya ide-ide baru dan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. Tantangan yang dihadapi selanjutnya adalah bagaimana mengubah ide-ide kreatif

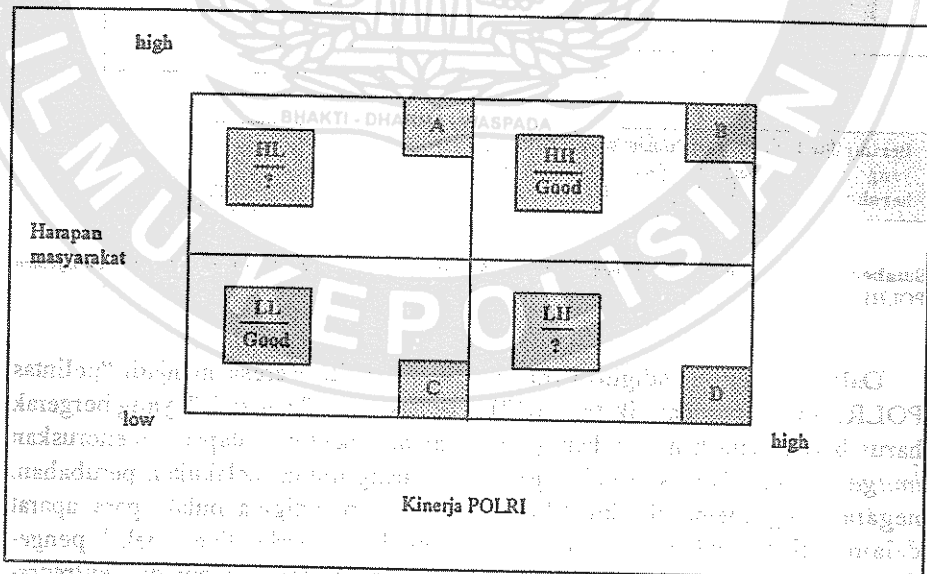
lebih jauh. Mereka menjadi "pelintas batas" atau "generalis", yang bergerak antar sektor, dapat meneruskan peluang untuk melakukan perubahan. Dalam paradigma inilah, para aparat kepolisian perlu diberi bekal pengetahuan akademis menjadi "entrepreneur". Karena seseorang yang di-juluki *entrepreneur* adalah orang yang mampu bergerak keluar dari masalah

yang dihadapi, sekaligus mendapatkan sudut pandang yang lebih luas.

Seorang *entrepreneur* juga memiliki ketajaman dalam memotret kebutuhan masyarakat dan berusaha memenuhi dan memuaskannya. Upaya ke arah ini membutuhkan metodologi dan ilmu tersendiri yang dapat dipelajari dalam program Magister Manajemen (MM). Kepuasan masyarakat (sebagai pelanggan) pada dasarnya tercipta jika apa yang diharapkan masyarakat dapat dipenuhi atau diberikan oleh POLRI (lihat keadaan B dan C pada Bagan 6).

Pusat gerak pelayanan POLRI harus mengikuti kurva linear dan sejajar menuntut harapan masyarakat. Apabila pusat gerakan pelayanan POLRI berada di luar lingkaran konsep ini (seperti keadaan pada kuadran A dan D), maka akan melahirkan ekonomi biaya tinggi atau dapat dikatakan kepolisian melakukan pelayanan sia-sia yang justru menimbulkan pelebaran *gap* yang tidak memberikan kepuasan kepada masyarakat. Hal ini lebih merupakan persoalan manajerial yang dapat dipelajari secara mendalam dari konsep-konsep marketing modern.

Bagan 6
Konsep Kepuasan Pelayanan



Pada akhirnya untuk menciptakan aparat kepolisian yang mandiri, perguruan tinggi dalam hal ini universitas kepunyaan Yayasan Kepolisian, Universitas Bhayangkara, perlu menyuguhkan beberapa konsep pola tingkah laku manajerial Polri yang mencakup empat dimensi yang dikembangkan oleh Howard H. Stevenson, sebagai berikut: (i) Orientasi strategis. Dalam konteks ini, terjadi perubahan teknologi, perubahan kemampuan masyarakat serta kemauan masyarakat untuk membayar lebih tinggi harga barang dan jasa yang diinginkan, dan perubahan gaya hidup serta perubahan politik akan menarik masyarakat ke dalam pola tingkah laku yang lebih profesional; (ii) Komitmen terhadap peluang. Perbedaan seorang polisi yang mandiri dan profesional akan ditentukan oleh kemampuannya dalam memahami peran organisasi dan lembaga-lembaga ekonomi dengan sangat baik, sehingga mereka tidak hanya mampu membuat komitmen tetapi juga mampu keluar dari suatu kondisi yang memang tidak lagi menguntungkan/bermanfaat; (iii) Komitmen terhadap sumber daya. Seorang aparat kepolisian yang memiliki semangat kemandirian harus berusaha mendapatkan manfaat yang maksimal dengan sumber daya yang minimal. Apakah kemandirian POLRI harus juga diikuti oleh perubahan aparat kepolisian, akan tergantung pada berapa besar nilai tambah yang dapat diciptakan. Jika penambahan input

(*marginal cost*) tidak mampu meng-gandakan *marginal benefit* dalam rangka pelayanan masyarakat, maka penambahan jumlah aparat menjadi tidak berguna dan justru merusak citra polisi. Tetapi persoalan kedua, apakah bisa terjawab bahwa dengan sumber daya yang minimal yang dimiliki POLRI saat ini, walaupun dalam suasana kemandirian POLRI, dapatkah diciptakan nilai tambah yang lebih besar? Jawaban atas kedua persoalan di atas lebih ditentukan oleh kemampuan *managerial* yang dimiliki aparat kepolisian; dan (iv) Kontrol terhadap sumber daya. Keprofesional dan kemandirian POLRI juga mencakup kemampuan untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki orang lain seperti keahlian-keahlian, ide-ide, dan bakat-bakat orang lain (masyarakat) serta memutuskan kualifikasi dan jumlah sumber daya apa saja yang akan diperlukan kepolisian. Bagaimana mengajak partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam kerja dan pikiran profesional POLRI merupakan suatu agenda strategis yang perlu segera diwujudkan.

F. Penutup

Program MM bagi aparat Kepolisian mutlak diperlukan, terutama dalam rangka mewujudkan "Citra Unggulan" POLRI yang selama ini terasa kurang baik di mata masyarakat. Tuntutan ini semakin diperlukan ketika pemerintah telah memutuskan POLRI keluar dari ABRI.

Keberhasilan POLRI setelah keluar dari ABRI ditentukan oleh adanya parameter-parameter kinerja POLRI yang mewujudkan *trend* meningkat dibanding masa-masa ketika masih menyatu dalam wadah ABRI. Parameter yang memegang peranan cukup menentukan adalah bagaimana menciptakan pelayanan terbaik yang dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap tugas-tugas Kepolisian. Upaya membangun *image* baru masyarakat terhadap POLRI harus dilakukan di atas paradigma baru POLRI yaitu kemandirian dan keprofesionalan POLRI dalam mendesain strategi, melakukan tindakan dan merumuskan kebijakan-kebijakan baru untuk mengganti kebijakan-kebijakan lama yang tidak *responsible* terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat terkini. Di sini kehadiran program MM dapat membantu POLRI dalam memperluas wawasan fungsi-fungsi manajerial yang bercorak *civil management*. Sekaligus dalam hal ini, program MM mengajarkan bagaimana dunia usaha keluar dari krisis yang melanda, dan dalam perkembangan usahanya, perusahaan perlu memperhatikan hak-hak azasi manusia dan lingkungan hidup sekitar.

Sosialisasi peran POLRI dalam paradigma barunya perlu segera diwujudkan antara lain melalui jalur-jalur pendidikan, formal maupun non-formal, sehingga nilai-nilai pelayanan yang ada dapat terukur dan dapat dipahami masyarakat luas agar harapan-harapan masyarakat tidak

menjadi "bias" terhadap peran POLRI yang sesungguhnya. Aparat Kepolisian harus memiliki kemampuan baru untuk mewujudkan peran baru POLRI tersebut.

G. Daftar Pustaka

1. Brelin, H.K: Davenport, K.S; Jennings, L.P; and Murphy, P.F., 1994, "Focused Quality: Managing for Result", st. Lucie Press, Published by Kogan Page Limited.
2. Bambang Tri Cahyono, "Reformasi Manajemen", buku-buku, Badan Penerbit IPWI, Jakarta.
3. Kuratko D.F, and Hodgetts, R.M.; 1992, "Entrepreneurship: A Contemporary Approach", second edition, the Drydea Press.
4. Kotler, P., 1997, Marketing Management", Prentice Hall Inc.
5. Harian Republika, 2 April 1999.
6. Theby Mutis, 1995, "Kewirausahaan yang berproses", Program Pasca Sarjana MM Universitas Trisakti- PT. Gramedia.
7. Singgih Riphath dan Evi Subardi, "Manajemen POLRI untuk Menghadapi Ancaman Kamtibmas 10 tahun Mendatang", Mabes POLRI, 1998, Jakarta.
8. Zeithaml, Valeria, A.; A. Parasuramen and Leonard L.B., "Conceptual Model of Service Quality and its Implication for future Research", Journal of Marketing, USA, 1995. □

APA YANG PERLU ANDA SIAPKAN MASUK PTIK ?

Banyak para anggota Polri yang memenuhi syarat masuk PTIK, tetapi menemui keraguan apakah bisa masuk PTIK atau tidak. Dari pengamatan Redaksi, para calon tidak menyiapkan diri untuk mengikuti test yang diselenggarakan oleh Mabes Polri. Mereka kebanyakan sangat sibuk oleh tugas-tugas sehari-hari, sehingga tidak siap untuk mengikuti test.

Untuk mengatasi ini perlu anda menyiapkan diri sejak dini. Yang perlu anda siapkan adalah: mengerti apa yang akan di test; menyiapkan diri dengan membuat rencana yang matang, adakan segi coba.

1. Mengerti apa yang akan dites

Untuk mengerti apa yang akan dites, perlu mengetahui persoalan masuk PTIK. Persyaratan masuk PTIK adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat masuk pendidikan PTIK:

- 1) Perwira Polri berpangkat serendahnya Letnan Satu Polisi memiliki MDP 4 (empat).
- 2) Usia maksimal 32 tahun.
- 3) Mempunyai konduite baik yang dinyatakan dalam DAPEN min. 73.
- 4) Bermental baik dan tidak terlibat gerakan subversi atau ekstrim.
- 5) Diutamakan yang telah mengikuti DIKBANG SPES/Kejuruan.

b. Persyaratan dipenuhi:

- 1) Para peserta yang memenuhi persyaratan, diusulkan ditunjuk dengan Surat Perintah untuk mengikuti seleksi pendidikan PTIK.
- 2) Lulus seleksi meliputi:
 - a) Penelitian Administrasi.
 - b) Pemeriksaan kesehatan badan.
 - c) Test kesamaptaaan jasmani.
 - d) Psikotest.
 - e) Lulus ujian tertulis sebagai berikut:
 - Pengetahuan Kepolisian.
 - Pengetahuan umum.
 - Bahasa Inggris.
 - Karangan militer.

c. Lulus test wawancara yang dilaksanakan oleh panitia pusat.

d. Kelengkapan administrasi yang disiapkan:

- 1) Rekomendasi pimpinan.
- 2) Surat Perintah untuk mengikuti seleksi pendidikan PTIK.
- 3) Daftar Penilaian atau DAPEN.
- 4) Daftar riwayat hidup.
- 5) Foto copy Skep Pengangkatan Pertama menjadi Perwira.
- 6) Foto copy Skep Pangkat Terakhir.
- 7) Foto copy Skep Jabatan Terakhir dan Sebelumnya.
- 8) Foto copy Ijazah Pendidikan ABRI.
- 9) Foto copy buku naskah kesehatan perorangan.

2. Menyiapkan diri dengan membuat rencana yang matang

a. Menyiapkan diri baik dari kesehatan maupun fisik. Untuk menyiapkan kesehatan anda, anda perlu mengecek kesehatan anda kepada dokter setempat. Ikuti nasehat-nasehatnya, agar supaya pada saat test nanti kondisi kesehatan anda tetap pada kondisi yang baik (memenuhi syarat kelulusan).

Sedangkan untuk menyiapkan fisik anda, perlu anda membuat jadwal latihan fisik (kesamaptaa) seperti yang akan ditekankan, yaitu lari selama 12 menit, pull up, push up, set up, squat jump, suttle run. Nilai tertinggi lari kesamaptaan tersebut adalah lari selama 12 menit. Untuk itu disarankan latihan lari selama 12 menit, perlu dilaksanakan secara periodik.

b. Psikotest. Untuk menyiapkan psikotest, yang perlu anda siapkan adalah konsultasi pada psikolog setempat, apa yang perlu anda kerjakan, tentunya setelah mengikuti test yang dilaksanakannya.

c. Menyiapkan ujian tertulis (Pengetahuan kepolisian, pengetahuan umum, bahasa Inggris, dan karangan militer).

1) Menyiapkan diri pada test pengetahuan kepolisian. Untuk menyiapkan pengetahuan kepolisian, perlu anda baca referensi-referensi yang membahas fungsi kepolisian, maupun fungsi pendukung dan fungsi pembinaan. Referensi yang dapat dibaca antara lain Vadenikum Polri Tk. I, maupun buku-buku yang lain. Agar supaya anda mempelajari secara sistematis, buatlah jadwal mempelajarinya.

2) Menyiapkan diri test pengetahuan umum. Untuk menyiapkan diri mempunyai pengetahuan umum yang cukup, maka perlu anda mencermati materi pada surat kabar, majalah, berita dan Radio/TV. Khusus dari

berita surat kabar dan majalah, kami sarankan membuat klipng dengan dikelompokkan pada:

- Politik
- Ekonomi
- Sosial-budaya
- Hankam.

Dari klipng tersebut, anda susun dengan baik, mudah anda buka dan baca kembali. Setelah itu buatlah alur peristiwa/kejadian. Hal tersebut akan mudah pemahaman pengetahuan umum yang anda baca.

d. Menyiapkan diri pada test bahasa Inggris, untuk menyiapkan pada test bahasa Inggris adalah dengan kursus bahasa Inggris. Bagi yang tidak ada tempat kursus, dapat Anda membeli satu set buku TOEFL dengan kasetnya. Anda pelajari dengan saksama, dan pada kesempatan tertentu anda ikuti test bahasa Inggris di kota terdekat.

e. Menyiapkan diri pada test karangan militer. Yang perlu kami sarankan adalah latihan praktek mengarang dengan berpedoman buku Teknik Membuat Karangan yang disusun oleh Djunaidi Maskat H. Bila ingin mencari referensi tersebut dapat anda pesan ke Redaksi majalah ini. Hasil latihan Anda dapat anda konsultasikan dengan senior anda di sini, atau anda kirim ke Redaksi majalah Bhayangkara, anda akan dibimbing langsung oleh penulis buku tersebut.

f. Menyiapkan test wawancara. Yang perlu anda siapkan adalah pemahaman masalah dan pemecahannya. Untuk menyiapkan test ini anda perlu diskusi dengan teman-teman anda. Kalau perlu anda bisa minta tolong senior anda untuk memandu dan sekaligus mengoreksinya. Bagi yang di Jakarta dan sekitarnya dapat anda minta bimbingan pada Redaksi ini, nanti akan dikoordinasikan pelaksanaannya.

Penjelasan teknis akan dibahas edisi berikutnya. □